

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN
AJARAN 2012-2013 (STUDI KASUS SEKOLAH DASAR NEGERI 017 BUKIT BESTARI)**

Try Mulia Vitriany

Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
dolista@gmail.com

Abstrak

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara umum program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 017 Bukit Bestari. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Informan berjumlah 4 orang terdiri dari Kepala Sekolah, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah. Dimana Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif kualitatif. Dari hasil analisa dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk dimensi komunikasi mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah berjalan cukup baik karena hasil yang dicapai cukup optimal seperti sosialisasi dari pihak sekolah kepada wali murid. Selanjutnya pada dimensi sumber-sumber terutama dalam ketersediaan fasilitas yang dimiliki masih kurang memadai seperti meja dan kursi. Kemudian dimensi kecenderungan dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai dalam melaksanakan kebijakan secara keseluruhan telah menanamkan sikap menerima setiap keputusan yang telah diberikan oleh pimpinan (kepala sekolah) dan tetap berpedoman pada Surat Keputusan (SK). Selanjutnya pada dimensi struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah juga sudah cukup baik dilihat dari aspek ketersediaan petunjuk teknis proses dokumen Bantuan Operasional Sekolah. Setelah dilakukan penelitian, maka hasil akhir penelitian dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan program bantuan operasional sekolah Tahun Ajaran 2012-2013 (Studi di Sekolah Dasar Negeri 017 Bukit Bestari) sudah berjalan baik. Pelaksanaan program sudah berjalan cukup efektif karena sudah hampir mencapai hasil yang diharapkan.

Kata kunci: Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Bantuan Operasional Sekolah.

ABSTRACT

One of the government's policy in the field of education. The school Operational Assistance (BOS). According to the Ministry of Education and Culture in general school fee assistance program aims to ease the burden of the public financing of compulsory education in the context of 9 (nine) years of quality. The purpose of this research, basically are to know about strategy of aid implementation operational program in 017 Elementary School Bukit Bestari. In the discussion of this paper used is descriptive qualitative. Informant amounted to four people consisting of the principal secretary treasurer and chairman of the school committee. Where the data collection techniques by observation and documentation interviews. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative analysis techniques. Of the results of the analysis in this study in can be concluded that for the dimensions of communication on the implementation of policies of the school operating aid program has been running pretty well since the results achieved are optimal as the socialization of the school to parents. The next dimension in the availability of sources mainly owned facilities are still inadequate as tables and chairs. Dimensions then it can be concluded that the tendency of every employee in carrying out the overall policy stance has instilled accept any decision given by the leadership (principals) and remain guided by the decree. The next on the dimensions of bureaucratic structure in the implementation of school operating assistance program policies also had pretty good views of aspects of the availability of technical guidance documents the process of school operational assistance. After research, the end result can be seen that the implementation of research policies of the School Operational Assistance program 2012-2013 school year (study of 017 Elementary School Bukit Bestari) has been running well. Implementation of the program has been quite effective reached the expected results.

Keywords: Policy, Implementation Policy, School Operational Assistance.

I. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu negara. Hal ini telah disadari oleh para pendiri bangsa Indonesia dengan meletakkan pembangunan sumber daya manusia sebagai tujuan negara yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pendidikan telah dipandang dan diyakini sebagai cara untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Searah dengan manfaatnya yang sangat luas dan berdampak pada peningkatan mutu di segala bidang, maka pendidikan telah menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat sejak Indonesia merdeka. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan semakin berkualitas dari waktu ke waktu dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua penduduk, terutama mereka yang masih pada usia sekolah pendidikan dasar.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kebijakan ini telah ditindaklanjuti dengan kebijakan penjelas dalam bentuk Peraturan Pemerintah Tentang program Wajib Belajar dan juga Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam rangka percepatan pencapaian program wajib belajar maka pemerintah telah menjabarkan kebijakan publik tersebut dalam berbagai program, salah satu di antaranya adalah program pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan dasar.

Program ini dimaksudkan untuk mempermudah akses layanan pendidikan dasar bagi seluruh warga

negara khususnya bagi warga negara yang mengalami hambatan karena faktor geografis maupun karena faktor ekonomi. Terlihat dari faktor geografis sukarnya transportasi menuju daerah yang akan mendapat bantuan pendidikan seperti daerah perbatasan, sedangkan jika dari segi ekonomi jelas terlihat kondisi perekonomian masyarakat yang dominan menengah kebawah.

Mahalnya biaya pendidikan jelas menjadi kendala utama bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan sehingga dikhawatirkan hanya anak-anak keluarga kaya yang dapat menikmatinya. Jika ini yang terjadi, maka tujuan dan cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia tidak akan pernah terwujud. Melalui Pasal 31 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, jelas menunjukkan keinginan kuat negara untuk mengemban tugas mewujudkan cita-cita tersebut.

Selain berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, dalam proses mencapai tujuan terlebih dahulu berpijak pada kerangka kebijakan publik yakni “untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan”. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. (Wahab, 1991:13)

Kebijakan publik dibuat bukan tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai

bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan mengurangi beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada dasarnya merupakan hal penting bagi pemerintah dalam mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan penyampaian rencana kerja dan anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan seperti keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)..

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah utama terletak pada lambatnya pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hal ini disebabkan belum masuknya semua laporan pertanggungjawaban keuangan pihak sekolah ke dinas pendidikan

sehingga pihak dinas pendidikan yang berwenang tidak berani mencairkan dana.

Sejalan dengan masalah keterlambatan pencairan dana, terdapat juga masalah lain yakni adanya temuan bahwa di Sekolah Dasar Negeri 017 Bukit Bestari terjadi kesalahpahaman pengertian mengenai pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pihak sekolah selaku pengelola dengan para wali murid, dimana wali murid masih menganggap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai subsidi khusus yakni diperuntukkan kepada siswa miskin padahal kegunaan dana bantuan tersebut peranannya mencakup semua proses kegiatan pendidikan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada pengimplementasian kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 017 Bukit Bestari, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulis tuangkan dalam tulisan yang berjudul : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Tahun Ajaran 2012-2013 (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 017 Bukit Bestari).

II. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Definisi kebijakan yaitu sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta dengan istilah “prioritas” yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dalam pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dengan agenda lainnya, proses agenda kebijakan

berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut sehingga kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan berupa impian atau rencana bagus tersimpat rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Wahab (2001:2) menyatakan bahwa:

“kebijakan bermakna bahwa, sebagai pedoman untuk bertindak, pedoman itu bisa sederhana atau kompleks bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau private, atau suatu deklarasi mengenai suatu program mengenai suatu aktivitas tertentu atau suatu rencana yang akan dilaksanakan atau yang akan diterapkan”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan kebijakan itu merupakan suatu pedoman, kerangka kerja atau acuan yang akan dilaksanakan atau dikerjakan. Dimana kebijakan tersebut, akan dikeluarkan oleh pihak yang berkepentingan atau pihak yang berkepentingan dalam bidang tersebut.

Friedrich (2006:7) menjelaskan bahwa :

“kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau serangkaian keputusan yang selanjutnya diikuti oleh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah serta mengapa mereka melakukannya, dengan tujuan untuk kepentingan publik. Dalam penelitian ini, Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikategorikan sebagai kebijakan pada level nasional yang selanjutnya diikuti oleh serangkaian kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah dalam hal implementasi kebijakan.

Lebih lanjut Young dan Quinn (2002:56) Kebijakan Publik adalah:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial yang melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

4. Kebijakan publik merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.

Secara khusus Wahab (2001:5-10) mengungkapkan ciri-ciri yang melekat pada kebijakan itu:

1. Kebijakan dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, seperti para ketua adat, ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan sebagainya.

2. Kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan melalui tindakan-tindakan yang direncanakan secara matang.

3. Kebijakan itu hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan itu tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, tetapi juga diikuti dengan pelaksanaan dan pelaksanaan pemberlakuannya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka kebijakan tersebut sebenarnya lebih mengacu pada suatu jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu dan berkesinambungan sepanjang waktu, namun dewasa ini istilah kebijakan sering digunakan secara luas dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Wahab (2001-102) bahwa tahap dalam pelaksanaan kebijakan atau lazim disebut dengan mekanisme umpan balik adalah sebagai berikut:

1. Keluaran Kebijakan (Keputusan)
Merupakan penerjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksana yang baku atau tetap untuk memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya) dan pelaksanaan keputusan penyelesaian.

2. Kepatuhan Kelompok Sasaran
Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah atau masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan, sikap tersebut dicerminkan dalam perilaku masyarakat, peluang bahwa sanksi-sanksi tertentu akan diikuti oleh timbulnya ketidakpatuhan.

3. Dampak Nyata Kebijakan
Adalah hasil nyata perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan. Hal ini bahwa keluaran kebijakan sudah sejalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penyimpangan terhadap pelaksanaan dan peraturan tersebut memiliki dampak sebab akibat yang tinggi.

4. Persepsi terhadap Dampak
Yaitu penilaian atau pemahaman yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung atau bahkan merubah atau merevisi kebijakan tersebut. Persepsi tersebut didasarkan pada evaluasi bahwa

dampak sudah sejalan dengan tujuan-tujuan undang-undang yang sebenarnya.

5. Revisi (perbaiki) Kebijakan

Yaitu merupakan upaya-upaya penyesuaian atau tindakan lanjut terhadap kekeliruan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, dengan jalan merubah secara mendasar kebijakan tersebut atau hanya memperbaiki aspek-aspek dari muatan atau isinya yang dinilai menghambat pencapaian tujuan. Suatu hal yang lumrah jika dalam setiap kebijakan itu terdapat kekeliruan atau kekurangan yang harus diperbaiki, sebab tidak ada satu kebijakan yang bersifat sempurna.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

Winarno (2002:109) implementasi kebijakan dalam arti luas adalah sebagai alat administrasi hukum berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dari pengertian itu dapat terlihat bahwa implementasi kebijakan adalah kerja sama beberapa orang bahkan organisasi untuk menjalankan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan tersebut.

Meter dan Horn dalam Agustino (2006:139) implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok, pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada upaya untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan yang telah ditetapkan tersebut.

Dunn (2000:109) menyatakan bahwa:

“pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain-lain.”

Menurut Syafri dan Setyoko (2008:22)

Implementasi Kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah. Sebuah kebijakan akan berhasil tergantung pada implementasi atau pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penelitian tentang implementasi kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah ini pada dasarnya ingin melihat program BOS sebagai bentuk kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Adapun ranah kajian yang dilakukan adalah tentang implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang menghambat implementasi program BOS.

2.1 Pengertian Implementasi

Mazmanian (dalam Wahab;2005:68) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang,

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan.

Lebih lanjut Nugroho (2004:158) mengatakan bahwa implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: “Implementasi atau pelaksanaan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan monitoring serta evaluasi sebagai langkah akhir”.

Menurut Winarno (2007:144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan.

Luankali (2007:83) mendefinisikan “Implementasi sebagai suatu proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan (dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan dan Perintah Eksekutif)”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2 Model-model Implementasi

Tabel II.1. Model-model Implementasi

No	Teori	Variabel
I	II	III
1	Van Meter and Van Horn (1975)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi 2. Karakteristik Pelaksana/implementor agen 3. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 4. Kecenderungan
2	Mazmanian and Zabatie r (1983)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen (teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, perubahan yang dikehendaki), 2. Variabel intervening: <ul style="list-style-type: none"> • variabel didalam kebijakan (kejelasan dan konsistensi tujuan, berlaku teori kausal, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarkis, aturan pelaksanaan Perekrutan pejabat pelaksana) • Variabel di luar kebijakan (sosial, ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya konstituen, komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabat pelaksana) 3. variabel dependen (pemahaman lembaga pelaksana, kepatuhan objek)
3	Hogwood and Gun (1978)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi eksternal 2. Sumber daya 3. Hubungan kausal 4. Hubungan interdependensi 5. Pemahaman dan kesepakatan 6. Kejelasan perumusan tugas 7. Komunikasi dan koordinasi 8. Kekuasaan/power.
4	Grindle (1980)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi (content) kebijakan 2. Konteks kebijakan
5	George Edward III (1980)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi/komitmen implementor 4. Struktur birokrasi

Sumber data : Joko Widodo (2006:96)

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk menjelaskan gambaran nyata tentang implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Sugiyono (2005:11) penelitian deskriptif yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti memilih lokasi penelitian dilingkungan Sekolah Dasar Negeri 017 Bukit Bestari. Adapun alasan dalam pengambilan lokasi penelitian karena adanya permasalahan terkait Bantuan Operasional Sekolah seperti adanya kesalahpahaman masyarakat tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang didapat secara langsung dari informan yaitu kepala sekolah, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah melalui wawancara dan konsultasi masalah penelitian. Data yang diperoleh, yaitu data implementasi kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta data penghambat kebijakan tersebut.

b. Data Sekunder

Data yang sifatnya sudah objektif, biasanya sudah diolah oleh pihak kedua, dalam arti sudah tersusun, tercatat dan terdata. Data sekunder merupakan data tidak langsung atau data tambahan yang berguna untuk melengkapi data primer. Data yang diperoleh untuk mendukung kelengkapan data yang dibutuhkan terdiri dari: data sejarah berdirinya Sekolah, visi dan misi dan struktur organisasi.

4. Informan

Informan menurut Arikunto (2010:188) adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila keterangannya karena di pancing oleh pihak peneliti istilah "Informan" ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.

Sedangkan menurut Hendarso dalam Auliyanti (2008:22) menjelaskan bahwa:

"penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam, yaitu informan kunci (key informan), informan utama dan informan tambahan. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok

yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti”.

Dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* menurut Sugiyono (2011:85) adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang terdiri dari Kepala Sekolah, Sekretaris, Bendahara, Dewan Guru dan Ketua Komite Sekolah dengan alasan karena 6 orang Informan ini yang lebih mengetahui kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian maka digunakan teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Jika wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Mengamati

kondisi dilapangan secara langsung dan melihat aktifitas/tindakan masyarakat dan para pelaksana secara langsung di lokasi. Dengan menggunakan alat berupa daftar *checklist*.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya kecil/sedikit. Teknik pengambilan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report* atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data untuk memperoleh bahan data dan bahan yang bersifat konseptual teoritis yang dilaksanakan dengan mempelajari berbagai macam literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti data sejarah berdirinya Sekolah, uraian tugas dan fungsi, visi dan misi.

Selain itu dapat berupa foto-foto yang berkaitan dengan penelitian serta aktifitas-aktifitas dilokasi penelitian yang diperoleh dari hasil temuan data dilapangan.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan menganalisa data-data yang didapat dari penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif.

Moeleong (2005:35) menyatakan bahwa “analisa data kualitatif adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang di sarankan oleh data”.

Alasan menggunakan atau memilih analisa data deskriptif kualitatif yaitu karena peneliti hanya ingin mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana apa adanya, tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Langkah analisisnya menentukan bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah.

Data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari wawancara, diorganisir dan disusun. Setelah data tersusun, maka dilakukan penafsiran dan pembahasan terhadap data yang ditemukan tersebut. Jadi dalam analisis deskriptif kualitatif ini, peneliti tidak menggunakan peralatan matematis atau teknik statistik sebagai alat bantu analisis, tetapi menggunakan penjelasan secara deskriptif tentang apa yang ditanyakan pada informan.

IV. PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan

Penelitian ini membahas terlebih dahulu mengenai identitas atau karakteristik informan guna mendapat informasi yang akurat dalam menganalisis data, sehingga data tersebut dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya dalam pembahasan dan menganalisis tentang “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2012-2013 (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri 017 Bukit Bestari). Informan dalam penelitian

ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah, 1 orang Sekretaris, 1 orang Bendahara, 2 orang Guru dan 1 orang Komite sekolah. Karakteristik informan yang peneliti jelaskan adalah data tentang tentang jabatan kerja, tingkat pendidikan, dan umur.

B. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2012-2013 (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri 017 Bukit Bestari)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini mengacu pada teori model Edward III dalam Riant (2012:693), untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu *communication, resources, disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures*.

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan, dimana proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Berkenaan dengan hal itu maka program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat berjalan dengan baik jika sudah ada pemahaman yang sama, terutama pihak pelaksana (sekolah), penerima (siswa/orang tua/komite sekolah), dan pandangan tokoh masyarakat.

Sekolah harus mensosialisasikan kepada pihak sekolah (guru), orang tua/komite, dan tokoh masyarakat supaya tidak ada salah penafsiran tentang program Bantuan Operasional Sekolah sehingga program tersebut menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Komunikasi dalam hal ini sangat penting, karena menyangkut proses penyampaian informasi. Terkait hal itu dalam Komunikasi dapat dilihat

tiga indikator yaitu Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi.

a) Transmisi

Pada tahap transmisi menghendaki agar kebijakan disampaikan tidak hanya kepada pelaksana tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terkait kebijakan. antara pihak sekolah dan komite sekolah menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tahap transmisi menggunakan cara sosialisasi, karena sosialisasi dianggap mempermudah dalam memperkuat proses komunikasi itu sendiri. Rapat komite sekolah merupakan media pendukung dari pelaksanaan sosialisasi kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah.

b) Kejelasan

Pada tahap kejelasan menghendaki agar kebijakan yang diberikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Apabila salah satu komponen tidak bisa dipenuhi maka hasil yang dicapai tidak efektif.

c) Konsistensi

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah

konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan setiap kebijakan. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

a) Staf

Barangkali sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Salah satu masalah yang dihadapi adalah sedikitnya staf yang memiliki keterampilan-keterampilan dalam pengelolaan.

- b) Informasi
- Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan ini berarti bahwa pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan.
- c) Wewenang
- Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Wewenang sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Searah dengan hal tersebut, dalam kebijakan Bantuan Operasional Sekolah sesuai mekanisme yang berlaku bahwa setiap lembaga yang mendapatkan dana Bantuan akan diberikan keleluasaan baik itu dari segi kewenangan maupun kebijakan dalam pelaksanaannya.
- d) Fasilitas
- Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Implementasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar tidak akan berhasil, jika tidak dilengkapi gedung sekolah yang memadai, buku-buku sebagai bahan pelajaran, kurangnya tenaga pendidikan dan lain sebagainya.

c. Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan ini merupakan kemauan, dan keinginan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Kecenderungan ini akan timbul manakala menguntungkan tidak hanya organisasinya tetapi juga individu. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan.

Dengan demikian, kecenderungan-kecenderungan dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan setiap kebijakan. Kecenderungan tersebut meliputi: pengangkatan birokrat dan pemberian insentif.

a) Pengangkatan Birokrat

Kecenderungan-kecenderungan pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Yang menjadi persoalan adalah bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pimpinan, mengapa mereka tidak diganti dengan orang yang lebih bertanggungjawab.

b) Pemberian Insentif

pada Sekolah Dasar Negeri 017 Bukit Bestari dalam pemberian insentif pada setiap bidang telah dilakukan, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama melalui rapat. Diketahui pihak sekolah

telah menetapkan lima bidang untuk mendukung kelancaran kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah, pemberian insentif dimaksudkan untuk memenuhi setiap kegiatan.

d. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun, implementasi kebijakan masih belum efektif karena adanya ketidakefisien struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi.

a) Standard Operating Procedures (SOP)

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures*, SOP).

Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pembuat kebijakan dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

b) Fragmentasi

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan.

Pada kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah memiliki mekanisme dalam pelaksanaannya, banyak badan-badan organisasi pemerintah yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan ini yakni kementerian kebudayaan, dinas pendidikan serta sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Melalui badan-badan organisasi tersebut mekanisme kebijakan dapat berjalan, kementerian bertindak untuk selalu cermat dalam setiap proses pengalihan dana, kemudian pihak dinas pendidikan dituntut untuk cermat dalam menginput data-data dari pihak sekolah agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian dana serta pihak sekolah yang bertugas untuk cepat dalam mengkonfirmasi jumlah siswa serta laporan pertanggungjawaban.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari dimensi komunikasi, pelaksanaan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah terlaksana dilihat dari indikator transmisi pelaksanaan program terwujud dengan diadakannya rapat komite kemudian setelah rapat berjalan maka akan timbul kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan serta berdampak pada konsistensi dari kebijakan bantuan operasional sekolah tersebut.
2. Dimensi sumber-sumber, pelaksanaan kebijakan program bantuan operasional sudah terlaksana dilihat dari indikator staf yang tersedia pada Sekolah Dasar Negeri 017 Bukit Bestari tidak memiliki staf khusus yang membidangi namun guru yang merangkap menjadi pengelola BOS kemudian dilihat dari indikator Informasi dalam hal ini, sudah terlaksana sesuai dengan kebutuhan akan informasi dan ketetapan data-data selanjutnya indikator wewenang terlihat bahwa pelaksana kebijakan bergerak sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dan indikator terakhir yakni Fasilitas mengenai hal ini sarana prasarana pendukung pembelajaran belum memadai dikarenakan minimnya dana yang diterima pihak sekolah.
3. Dimensi kecenderungan-kecenderungan dalam pelaksanaan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah dilihat dari indikator Pengangkatan Birokrat bahwa belum pernah ada pengangkatan

birokrat di Sekolah Dasar Negeri 017 Bukit Bestari karena pihak sekolah telah menyesuaikan penempatan jabatan dan tanggungjawab dengan kemampuan yang dimiliki staf tersebut, kemudian dari indikator Pemberian Insentif dalam pelaksanaan kebijakan cenderung diberikan untuk kegiatan operasional sekolah bukan personal.

4. Dimensi struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah dilihat dari indikator *Standard Operating Procedure* (SOP) sudah tersedia setiap tahunnya pedoman dalam pelaksanaan kebijakan sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (JUKDIS) terkait penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan, selanjutnya indikator Fragmentasi dalam hal ini keseragaman kebijakan pada dasarnya sama namun setelah di embankan kepada sekolah-sekolah yang mendapatkan dana bantuan, kebijakan menjadi wewenang sekolah makadari itu setiap sekolah tidak memiliki keseragaman kebijakan dalam mengelola dikarenakan kebutuhan setiap sekolah dalam pelaksanaan kebijakan berbeda.

B. Saran

1. Diharapkan sosialisasi seperti brosur yang berkaitan dengan kebijakan bantuan operasional sekolah agar setiap wali murid yang datang ke sekolah dapat membaca serta memahami.
2. Agar Kepala Sekolah segera mengusulkan sarana dan prasarana

yang masih belum memadai demi terciptanya kelancaran dan keefektifan peserta didik maupun pengajar dalam melakukan proses pembelajaran disekolah.

3. Untuk para pelaksana dan penanggungjawab dalam kebijakan program bantuan operasional sekolah dapat berperan secara optimal sesuai dengan tugasnya agar tujuan kebijakan bantuan operasional sekolah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.
4. Demi tercapainya tujuan dari kebijakan program bantuan operasional sekolah ini dibutuhkan koordinasi dari instansi terkait diantaranya Kementerian dan Dinas Pendidikan agar tercapai implementasi yang efektif.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal.2002.*Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah

Agustino,Leo.2006.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung:Alfabeta

Arikunto,Suharsimi.1995.*Management Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta

_____.2007.*Manajemen Penelitian*.Jakarta:Rineka Cipta

_____.2010.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (cetakan ke-14)*.Jakarta:Rineka Cipta

Auliyanti, Adelia.2008."Gambaran Faktor-faktor yang Berperan dalam Bertahannya Remaja Perempuan dalam Relasi Pacaran

Berkekerasan".*Skripsi*, Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta.

Dunn, William N.2000.*Analisis Kebijakan Publik*.Jakarta:Bumi Aksara

Fatah, Nanang, 2006, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Hasibuan, SP Malayu.2001.*Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*.Jakarta: Bumi Aksara

Karsidi,Ravik, 2007, *Sosiologi Pendidikan*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press-ed

Luankali, Bernadus.2007.*Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Evaluasi Pengambilan Keputusan*.Jakarta: Amelia Press

Moeleong,J.Lexy.2005.*Metode Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Rajawali Pers

Nasution,Prof.Dr.S.2003.*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*.Bandung: Tarsito

Nugroho,Riant D.2004.*Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.Jakarta:PT.Gramedia

_____.2012.*Public Policy* (Cetakan ke 4), Jakarta:Gramedia

Subarsono.2005.*Analisa Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono.2005.*Metode Penelitian Administrasi*.Bandung:Alfabeta

_____.2011.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung:Alfabeta

Syafri, Wirman dan Irwan Setyoko.2008.*Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*.Jatinangur: Alqaprint

Wahab, Abdul Solichin.1991.*Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*.Jakarta:Bumi Aksara

- _____ .2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- _____ .2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- <http://arenakami.blogspot.com/2012/06/evaluasi-lingkungan-kebijakan.html>
:(diakses pada tanggal 19/02/2014 : 14:00)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 (Petunjuk Teknis) Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013

UUD RI/1945 Amandemen

UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional